

## SINOPSIS

Program pembangunan dan pengembangan Kawasan Bahari Terpadu merupakan sebuah program baru bagi Kabupaten Purworejo untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang terdapat di wilayah selatan yang dimaksudkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai pada khususnya dan masyarakat Purworejo pada umumnya sesuai dengan isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Kabupaten Purworejo tentang KBT. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemukan baik itu dari dalam maupun dari luar. Sehingga dalam penelitian ini, penulis berusaha mengangkat permasalahan atau meneliti *bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Kabupaten Purworejo tentang Kawasan Bahari Terpadu.*

Untuk mengetahuinya penulis mengadakan penelitian melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara baik dari aparat Pemerintah Kabupaten Purworejo, kantor BAPPEDA, kantor Badan Pelaksana KBT dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 dari Kantor Bupati Kabupaten Purworejo, Gambaran umum Kabupaten Purworejo yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Purworejo, serta data-data penunjang lainnya yang diperoleh dari kantor Badan Pelaksana KBT dan observasi langsung di Pantai Jatimalang. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah tehnik analisa data kualitatif.

Sepanjang pembahasan dalam skripsi ini melalui analisa data, diperoleh bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang KBT dari faktor komunikasi intern pihak instansi dan antar masyarakat masih kurang, Sumber daya yang ada sudah saling mendukung hanya perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal anggaran, Sikap pelaksana (Badan Pelaksana KBT) yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ternyata belum dilakukan sepenuhnya karena kurangnya koordinasi yang baik dan kurangnya tenaga professional serta berdisiplin tinggi terbukti bahwa program yang seharusnya sudah dilaksanakan masih belum terlaksana dan juga karena ditemukannya salah satu staf KBT yang kurang memahami mengenai program pelaksanaan KBT. Sesuai dengan hal implementasi kebijakan, program KBT belum dikatakan berhasil secara maksimal, dikarenakan program ini masih baru.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program pembangunan dan pengembangan KBT belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal, sebab keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat, pemerintah, serta komunikasi dan koordinasi intern maupun antar instansi dengan masyarakat, juga potensi sumber daya baik sumber daya manusia, sumber dana maupun sarana dan prasarana. Untuk itu saran yang diajukan disini adalah perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari kebijakan program KBT dan komunikasi antar instansi dan dengan masyarakat guna terciptanya keterpaduan dalam pelaksanaan program KBT yang kemudian terlaksanalah semua rencana program KBT.